

**PARIAMAN PADA MASA OTONOMI DAERAH:
(Studi Perubahan Fisik dan Sosial Ekonomi 2002-2016)**

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan(S1)



Oleh

Devitrah Halim

1101689/2011

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PARIAMAN PADA MASA OTONOMI DAERAH:
(Studi Perubahan Fisik dan Sosial Ekonomi 2002-2016)**

Nama : Devitrah Halim
NIM/TM : 1101689
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2017

Disetujui oleh :

Pembimbing I



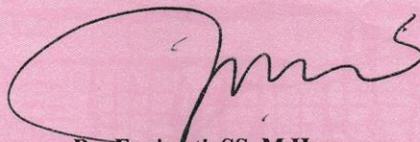
Drs. Zul Asri, M.Hum
NIP. 19600603 198602 1 001

Pembimbing II



Abdul Salam, S.Ag, M.Hum
NIP. 19720121 200812 1 001

Ketua Jurusan



Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devitrah Halim
Nim/TM : 1101689/2011
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“KOTA PARIAMAN: PADA MASA OTONOMI DAERAH STUDY PERUBAHAN FISIK DAN SOSIAL EKONOMI (2002-2016)”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia di proses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, September 2017

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

Saya yang menyatakan



Devitrah Halim
NIM. 1101689/2011

ABSTRAK

Devitrah Halim. NIM :1101689”Kota Pariaman : Pada Masa Otonomi Daerah
Studi Perubahan Fisik dan Sosial Ekonomi (2002-2016)”.
Skripsi Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Padang.

Skripsi ini merupakan kajian sejarah yang menggambarkan perubahan dan perkembangan Kota Pariaman dalam bidang fisik, sosial dan ekonomi dalam 14 tahun otonomi daerah di Kota Pariaman. Perkembangan dan pertumbuhan kota ini patut untuk diteliti karena berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang selama ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya dan masih dilema apakah otonomi daerah ini menimbulkan hal positif atau hal negatif bagi daerah yang melaksanakan otonomi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Latar Belakang lahirnya Kota Pariaman 2002, (2) Perkembangan Kota Pariaman dalam bidang fisik, sosial, dan ekonomi 2002-2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah. Oleh sebab itu sesuai dengan kaidah penelitian sejarah, maka penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu, (1) Heuristik; (2) Kritik sumber melalui kritik internal dan kritik eksternal; (3) Analisis dan interpretasi data; dan (4) Historiografi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman yang berdiri pada tanggal 2 Juli 2002 yang berarti telah 14 tahun melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2016 memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Hal ini bisa kita lihat pada perkembangan fisik Kota Pariaman yang mengalami perkembangan yang signifikan dan sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakatnya. Pembangunan gedung walikota di Galombang, gedung DPRD Kota Pariaman di Nareh, *Sport Center* di Karan Aur, Rehabilitasi Pasar Kuraitaji, *Homestay* di Pulau Angso Duo, pembenahan Pantai Gondariah, Pantai Kata, Pantai Cermin dan pembangunan jalur dua di jalan protokol Kota Pariaman hanya sebagian kecil dari pembangunan fisik di Kota Pariaman yang secara tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Semakin *tacelaknya* perkembangan Kota Pariaman juga ikut merubah aktifitas ekonomi dan sosial di tengah masyarakat Kota Pariaman. Sektor wisata yang dimaksimalkan pembangunannya untuk menambah pendapatan daerah ikut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Perkembangan Kota Pariaman yang pesat bukan berarti tanpa masalah, mulai dari gempa pada tahun 2009 silam, sengketa pembebasan lahan, dan mental masyarakat Pariaman yang berdagang yang kadang main *cakia mariah* dalam melayani wisatawan hanya sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi pemerintahan Kota Pariaman dalam berbenah dan berkembang dalam pembangunan Kota Pariaman yang lebih baik kedepannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul: “PARIAMAN PADA MASA OTONOMI DAERAH: (Studi Perubahan Fisik dan Sosial Ekonomi 2002-2016)”. Adapun tujuan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan untuk Nabi Muhammad yang telah merubah akhlak manusia, dari akhlak yang biadab kepada akhlak yang beradab seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum dan Bapak Abdul Salam, S.ag, M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga menjadi sebuah tulisan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum., Bapak Hendra Naldi, S.S, M.Hum., dan Ibu Dr. Erniwati, M.Hum. selaku penguji yang telah bersedia memberikan masukan, kritikan, dan saran dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Erniwati, M.Hum. sebagai Ketua Jurusan Sejarah, Bapak Dr. Ofianto, M.Pd. sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah, bapak Drs. Etmi Hardi M.Hum. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan fasilitas,

kemudahan, perhatian, dan nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Sejarah.

4. Bapak Ir. Muhammad Hudaya selaku ketua BPS Kota Pariaman dan Bapak Dedi selaku Humas BPS Kota Pariaman yang telah memberikan banyak informasi. Selanjutnya kepada pegawai dan penjaga Perpustakaan Kota Pariaman Mr.H.St. Moh Rasyid yang memberikan dukungannya serta informasi yang peneliti butuhkan. Tidak lupa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah melayani dan memberikan data kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Ucapan terima kasih yang sangat istimewa kepada kedua Orang Tua tercinta ibunda tercinta Gurharmisah dan ayahanda Bustami Aspon yang selalu memberikan dorongan secara moral dan material yang dibutuhkan demi kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial, terutama Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah khususnya teman-teman angkatan 2011 yang telah memberikan saran dan bantuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi mencapai kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Akhir kata, diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat

dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk perkembangan pendidikan khususnya Pendidikan Sejarah. *Amin ya rabbal'alam.*

Padang ,Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
1. Studi Relevan	11
2. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN	
A. Kondisi Fisik Kota Pariaman	
1. Letak Geografis	17
2. Iklim dan Curah Hujan	21
3. Penggunaan Lahan	22
B. Kondisi Kependudukan	
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	24
2. Ketenagakerjaan.....	29
3. Perumahan.....	33
C. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Pariaman	
1. Pendidikan	25
2. Kesehatan	27
3. Agama	30
4. Pemerintahan.....	31
D. Pengembangan Wilayah	

1. Potensi Pengembangan Wilayah	34
---------------------------------------	----

BAB III PERKEMBANGAN FISIK DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI KOTA PARIAMAN 2002-2016

A. Perkembangan Fisik dan Perubahan Sosial Ekonomi	
Kota Pariaman (2002-2008)	36
a. Gerak Pembangunan Fisik Kota Pariaman (2002-2008).....	36
b. Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	
Kota Pariaman (2002-2008)	39
B. Perkembangan Fisik dan Perubahan Sosial	
Ekonomi Kota Pariaman Tahun (2008-2016)	41
a. Perkembangan Fisik Kota Pariaman Tahun 2008-2016.....	41
b. Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat	
Kota Pariaman Tahun 2008-2016.....	63
c. Akuisisi Aset Kabupaten Padang- Pariaman	
untuk Kota Pariaman	73
d. Kendala-kendala dan Permasalahan dalam	
Perkembangan Kota Pariaman	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82

Daftar Pustaka	93
----------------------	----

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pariaman adalah sebuah kota hasil dari pemekaran Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya undang-undang No. 12 tahun 2002 mengenai pembentukan Kota Pariaman. Secara geografis, Kota Pariaman terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia¹. Terhitung sejak tanggal 2 juli 2002 Kota Pariaman resmi terbentuk dan mulai menjalankan sistem pemerintahannya sendiri terlepas dari daerah induknya Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman mulai menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang seharusnya sebagai jalan keluar untuk pemerataan pembangunan daerah di Indonesia tanpa disadari membuat munculnya raja-raja kecil yang menguasai daerah-daerah yang sedang berkembang. Selain itu 80% daerah otonomi kota/kabupaten di Indonesia ternyata masih menyusu kepada pemerintahan pusat.²

Otonomi daerah yang diharapkan muncul sebagai jawaban pemerataan pembangunan daerah-daerah di indonesia ternyata membawa masalah baru dalam tata laksana serta tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Beberapa parameter keberhasilan dari otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa faktor seperti

¹ Bapeda kota Pariaman, *Profil Daerah Kota Pariaman*, (Pariaman .2014)

²Tempo online 8 Oktober 2016” 80% daerah otonomi di Indonesia masih menyusu kepada pemerintahan pusat” di akses 5 juni 2017

pelayanan publik yang tidak bertambah dan kesejahteraan tidak meningkat, dibandingkan dengan saat bergabung dengan wilayah induk dahulu.

Masalah paling utama dalam sebuah otonomi adalah terbebaninya Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) oleh kebutuhan Daerah Non-Prioritas yaitu gaji pegawai yang harus dibayar setiap bulannya. Padahal prioritas utama APBD adalah pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menunjang pelayanan yang merata bagi masyarakat, sehingga APBD yang diharapkan sebagai sumber dana untuk melakukan pembangunan di dalam berbagai bidang malah terserap lebih banyak untuk membayar gaji pegawai. Dana yang tersisa untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu banyak daerah-daerah yang melaksanakan otonomi daerah pembangunannya menjadi terlambat dibandingkan kota-kota lain. APBD lebih banyak digunakan untuk pembiayaan untuk belanja konsumtif seperti pembelian baju dan gaji pegawai setiap bulannya ketimbang untuk belanja produktif seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung pembangunan yang mempunyai imbas secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat sekitarnya.

Sebelum tahun 1987 Pariaman adalah sebuah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat, adapun camat yang memimpin Pariaman pada waktu itu adalah Adlis Legan. Namun pada tahun 1986 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1986 tentang pembentukan Kota Administratif Pariaman oleh Presiden RI Soeharto tanggal 14 Agustus 1986 yang diundangkan melalui lembaran Negara RI nomor 49 tahun 1989³ kecamatan Pariaman dinaikan statusnya menjadi Kota Administratif Pariaman. Peraturan Pemerintah ini mengakhiri Pariaman sebagai sebuah kecamatan

³Armaidit Tanjung, *WALIKOTA PARIAMAN Dari Adlis Legan Hingga Mukhlis Rahman (1987-2013)*, Bappeda Kota Pariaman, Pariaman, 2012, hal. 24.

dan mengawali terbentuknya Pemerintahan Kota Administratif Pariaman dengan Walikota pertama adalah Adlis Legan.

Pada tahun 1999 Pemerintah NKRI mengeluarkan undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa daerah Indonesia dibagi atas Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom.⁴ Selanjutnya daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain.

Menyingkapi UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini banyak terdapat Pro dan Kontra di dalam masyarakat Pariaman tersendiri. Sebagian masyarakat Pariaman mendukung Pariaman menjadi Kota Otonom sekaligus melanjutkan kota yang telah dirintis sejak masa Wakotif Pariaman Adlis Legan dilanjutkan menjadi lebih maju dengan kewenangan yang tidak terbatas lagi di bawah pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Namun tidak bisa dipungkiri sebagian lain juga menolak wacana Pariaman menjadi Kota Otonom karena menganggap Pariaman belum mampu untuk mandiri dan berdiri sendiri. Hingga hal ini tidak saja terjadi di dalam masyarakat Pariaman, namun juga terjadi di dalam tubuh Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman selaku induk dari Kotif Pariaman.

Perjalanan panjang yang mewarnai Pro dan Kontra Pariaman menjadi Kota Otonom berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Sumatra Barat. Firdaus Amin didaulat menjadi Penjabat Walikota Pariaman. Firdaus Amin mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2003 setelah kalah dalam pemilihan Walikota Pariaman pada periode 2003-2008 yang dimenangi oleh Nasri Nassar. Pasca peralihan

⁴ UU nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab II, Tentang Pembagian Daerah, Pasal 2, Point 1.

kepemimpinan dari Firdaus Amin menuju Nasri Nassar, tampuk pemerintahan di pegang oleh Sultani Wirman(Agustus-Oktober 2003) berdasarkan instruksi dari Gubernur Sumatra Barat saat itu yaitu Zainal Bakar. Sebelum menjabat sebagai Pejabat Walikota Pariaman Sultani Wirman menjabat sebagai Asisten III bidang Kesejahteraan Sosial (Kessos) di kantor Gubernur Sumatera Barat.⁵

Nasri Nassar menjadi Walikota Pariaman setelah memenangi pemilihan Walikota Pariaman dengan 13 suara dari 19 anggota DPRD Kota Pariaman pada tahun 2003.⁶ Sebagai seseorang yang telah mengenal asam garam dalam pemerintahan, Nasri Nassar lebih memfokuskan perbaikan Kota Pariaman pada bidang pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Dalam bidang pembangunan pada pemerintahan H. Nasri Nasar sebagai Walikota Pariaman yang pertama diprioritaskan adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan dalam upaya memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal utama yang dilakukan juga adalah dengan pembangunan jalan-jalan disertai dengan pembangunan sarana transportasi karena itu akan memudahkan akses mobilisasi oleh masyarakat dari tempat satu ke tempat lainnya⁷.

Pembangunan sarana dan prasarana fisik dasar khususnya jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat pokok bagi kehidupan masyarakat, yaitu menciptakan atau meningkatkan kemudahan aksesibilitas dari satu lokasi ke lokasi lain. Esensi yang ingin dicapai adalah untuk penyediaan infrastruktur yang andal dalam mendukung perekonomian daerah.

⁵Armaidi Tanjung, *WALIKOTA PARIAMAN Dari Adlis Legan Hingga Muklis Rahman (1987-2013)*, Bappeda Kota Pariaman, Pariaman,2012,hal 71

⁶ *Ibid*, Hal 81

⁷ Yoetri, Wiztian dkk. *Sepuluh Tahun Sebagai Kota Otonom*. 2012. Pariaman: bappeda .

Setelah terbentuknya Kota Pariaman banyak pembangunan yang dilakukan di bidang pendidikan dengan dibukanya sekolah-sekolah baru. Dalam bidang pembangunan infrastruktur dibangunnya jembatan-jembatan rajang yang menghubungkan desa di Kota Pariaman dengan daerah di sekitarnya sekaligus sebagai sarana memudahkan para pedagang dan anak sekolah yang ingin ke Kota Pariaman dengan cepat⁸.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan pun tidak lepas dari tangan dingin 'Rezim' Nasar yang dikatakan oleh Armaidi Tanjung dalam bukunya " *Pariaman Dahulu, Kini, dan Masa Depan 2006*. Puskemas satu persatu dibangun di daerah-daerah yang menjadi wilayah Kota Pariaman. Pada tahun 2004 gedung farmasi dibangun. Berturut-turut juga dibangun puskesmas pembantu di Sirambang Marabu dan Kampuang Tengah. Puskemas Nareh di Rehab beserta beserta Puskemas Talago Sariak. Dua puskesmas Pembantu yang terdapat di Kampuang Baru dan Kuraitaji dinaikan Statusnya menjadi puskesmas⁹. Nasri Nassar menjabat menjadi Walikota Pariaman kurang dari 3 tahun setelah pada tanggal 15 januari 2007 wafat akibat radang tulang dan kanker paru-paru yang dideritanya. Pemerintahan Kota Pariaman selanjutnya di pegang oleh Ir. Mahyuddin selaku Wakil Walikota Pariaman yang secara otomatis menjadi Walikota Pariaman pada tahun 2007.

Pada tahun 2008 saat Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, tidak terkecuali dengan Pariaman yang juga melakukan pemilihan umum langsung untuk memilih Walikota Pariaman. Mahyuddin maju dengan

⁸ Wawancara langsung dengan mantan ketua anggota DPRD kota Pariaman buya Fuadi jalil.

⁹ *Ibid.*

Firdaus Amin sebagai Pasangan calon walikota dan wakil walikota dikalahkan oleh pasangan Muklis-Helmi yang menang tipis. Mahyuddin sempat mencurigai adanya kecurangan di berbagai TPS di Kota Pariaman. Melakukan gugatan ke pengadilan, namun gugatan itu ditolak dan keputusan pengadilan sudah final.¹⁰ Pemerintahan Kota Pariaman selanjutnya dilanjutkan oleh Muklis Rahman.

Pada masa pemerintahan Walikota Muklis Rahman dan Helmi Darlis pemerintahan Kota Pariaman kembali digenjot dalam misi mereka selama 5 tahun melaksanakan tugas mereka. Adapun misi mereka dalam pembangunan Kota Pariaman adalah:

1. Membentengi moral masyarakat dengan adat dan agama.
 2. Meningkatkan kualitas tamatan sekolah setiap jenjang pendidikan yang dilandasi moral keagamaan.
 3. Mengembangkan atraksi budaya tertentu
 4. Meningkatkan pemerataan dan pelayanan masyarakat.
 5. Mengembangkan perekonomian daerah yang terpadu dalam mendukung pariwisata
 6. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
- dalam pemerintahan¹¹.

Dalam masa pemerintahan Walikota Muklis-Helmi ini pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana pariwisata ditingkatkan sebanyak mungkin, sehingga sarana seperti WC umum, jalur khusus pejalan kaki, dan tempat-tempat rekreasi baru dibangun di berbagai titik di Kota Pariaman untuk meningkatkan kunjungan

¹⁰Armaidi Tanjung, *WALIKOTA PARIAMAN Dari Adlis Legan Hingga Muklis Rahman (1987-2013)*, Bapedda Kota Pariaman, Pariaman, 2012, hal 110

¹¹ *Ibid.* 157

wisatawan. Tempat-tempat wisata yang menjadi ikonik Kota Pariaman seperti Pantai Gondariah, Pantai Kata, Pulau Angso dan Pulau Kasiak pun dibenahi. Pada tahun 2013 Mukhlis kembali menjadi Walikota Pariaman untuk periode 2013-2018 dengan wakil Genius Umar setelah mengalahkan Wakil Walikota sebelumnya Helmi Darlis yang maju sebagai Calon Walikota Pariaman dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Tahun 2013. Genius sebagai Wakil Walikota Pariaman, Mukhlis melakukan berbagai pembenahan dalam berbagai bidang di Kota Pariaman sebagai upaya memaksimalkan segala potensi yang di miliki oleh Kota Pariaman.

Letaknya yang strategis dan dengan segenap potensi wisata yang dimiliki oleh kota ini dalam jangka waktu 14 tahun bisa bermetamorfosis menjadi daerah yang dulunya kotif ini bisa menjelma menjadi kota ideal yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Namun Kota Pariaman pada awal-awal berjalannya sistem pemerintahan di kota ini, ekonomi penduduk di kota yang dikenal dengan Kota Tabuik ini melemah, potensi wisata yang jadi andalan digembor-gemborkan sebagai potensi daerah ini tidak memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan, hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa dengan segala aset pariwisata yang minim disaat pemerintahan baru beranjak muda, pembangunan lebih difokuskan pada bidang lain.

Pariaman telah mengalami perubahan dari berbagai bidang, banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini walaupun gempa besar yang melanda Pariaman pada tahun 2009 banyak menghancurkan fasilitas publik. Pariaman mampu untuk berbenah dan kemudian muncul sebagai kota yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu daya tarik kota ini. Menarik jika kita kaji mengenai Kota Pariaman yang telah melaksanakan otonomi daerah selama 14 tahun ini muncul sebagai kota yang berusaha menjawab masalah yang ada dalam bentuk melakukan pembangunan di dalam berbagai bidang kehidupan dalam membantu

pelayanan yang merata bagi masyarakatnya, diantara sentimen terhadap kegagalan dari otonomi daerah di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini tentu saja didukung oleh berbagai faktor-faktor yang ada, baik itu internal maupun dari luar Pariaman sendiri yang ambil andil dalam perkembangan Kota Pariaman, seperti *Piaman bakumpuah*¹². Jika dilihat laju perkembangan Pariaman saat menjadi kotif hingga menjadi kota otonom, baik itu perkembangan fisik ataupun ekonomi kita akan melihat perbedaan yang menarik, bagaimana pemerintahan Kotif Pariaman saat itu yang berindukan Kab. Padang-Pariaman berusaha berkembang dengan segala keterbatasan wewenang dan kekuasaan pemerintahnya, karena segala keputusan yang dilakukan oleh Kotif Pariaman harus diketahui dan disetujui oleh Pemerintah Kab. Padang-Pariaman.

Selanjutnya jika melihat laju perkembangan Pariaman setelah menjadi kota otonom yang mendapatkan otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam bidang pembangunan. Pariaman yang telah ‘merdeka’ dari Kab. Padang-Pariaman, sekarang berusaha melakukan pembangunan-pembangunan dan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan Pariaman yang lebih baik ke depannya.

Kota Pariaman sebagai kota yang baru menjalani otonomi daerah harus memaksimalkan penggunaan APBD agar pembangunan Kota Pariaman terus berlanjut. APBD Kota Pariaman yang banyak terkuras untuk pembiayaan gaji, tidak menghambat laju pembangunan yang terus terjadi di Kota Pariaman. Pemerintahan Kota Pariaman dituntut untuk mengelola APBD Kota Pariaman untuk tujuan pembangunan walaupun sebagian besar dana APBD Kota Pariaman digunakan untuk biaya komsumtif.

¹²Armaid Tanjung, *Ibid*, hal. 54

Sejarah kota dalam kajian sejarah selalu menjadi topik yang penting untuk dikaji, karena kota identik dengan pemikiran-pemikiran dan perkembangan oleh kota itu sendiri. Tidak terkecuali dengan Kota Pariaman karena banyak hal-hal yang bisa dijadikan argumen mengapa kota ini layak untuk diteliti diantaranya yaitu:

Pertama, *pada masa Hindia Belanda*. Pariaman adalah pelabuhan penting pada masanya, karena Pariaman sebagai tempat lalu lintas dan merapatnya kapal-kapal dagang internasional yang melakukan transaksi perdagangan disini terutama perdagangan lada pada abad ke 16 dan ke -17.¹³ **Kedua** sudah lebih dari satu dekade menjadi kota otonom berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2002 tanggal 2 Juni 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman. Jadi menarik jika kita lihat pencapaian-pencapaian apakah yang telah tercapai oleh kota yang baru saja berbenah pasca dihantam gempa pada September 2009 silam ini. **Ketiga** kurang lebih sudah 15 tahun hingga saat ini Kota Pariaman melaksanakan otonomi daerah sebagai Kota Pariaman. Akan menarik nanti jika kita melihat apakah otonomi daerah ini memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Pariaman atau memberikan dampak negatif setelah melepaskan diri dari Kabupaten Padang Pariaman.

Atas dasar itulah penulis ingin mengetahui apakah Kota Pariaman ini sudah berkembang menjadi kota yang ideal yang diharapkan masyarakatnya ini telah sampai pada tahap ini atau belum. Sehingga penulis coba mengangkat judul diatas.

¹³ Bagindo Armaidi Tanjung, *Pariaman Dulu, Kini dan Akan Datang*. Bappeda Kota Pariaman kerjasama Pustaka Artaz, 2006. Hal 121

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dimulai pada tahun 2002 karena pada tahun ini Pemerintahan Kota Pariaman baru terbentuk. Batasan akhirnya adalah tahun 2016 karena dalam jangka waktu 14 tahun setelah otonomi daerah adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan sebuah penelitian sejarah. Batasan spasial tempat penelitian adalah Kota Pariaman yang terletak di tepi Pantai Barat Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kota Pariaman secara historis bisa disebut sebagai salah satu kota tua di Sumatera Barat, namun secara administratif adalah sebuah kota yang baru saja berkembang. Bagaimanakah perkembangan pembangunan fisik yang telah dialami oleh Kota Pariaman dalam masa otonomi daerah?
2. Pariaman awalnya adalah sebuah daerah kotif hingga sekarang telah menjadi sebuah Kota otonom yang di tuntut mampu untuk mandiri dalam pembangunan daerahnya. Bagaimanakah perkembangan dalam bidang sosial dan ekonomi Kota Pariaman pada masa menjadi kota otonom daerah? .

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, jadi adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan pembangunan fisik Kota Pariaman pada masa otonomi daerah (2002-2016).

2. Untuk mendeskripsikan perkembangan Pariaman pada masa Kota Otonom, baik itu perkembangan dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi (2002-2016).

Setelah penulis melakukan penelitian ini penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk:

Manfaat Teoritis:

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dalam menambah wawasan dan memperdalam pemahaman pembaca mengenai sejarah dan pembangunan Kota Pariaman sekaligus sebagai rujukan bagi rekan-rekan yang mau melakukan penelitian mengenai perkembangan kota dan memanfaatkan konsep-konsep dan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Manfaat Praktis

Penulis berharap dalam penulisan otonomi daerah ini banyak terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan dasar sebagai untuk menggali lebih jauh mengenai perkembangan Kota Pariaman dan mempunyai manfaat nanti untuk perkembangan Kota Pariaman ke depannya sekaligus bisa mengaplikasikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam merumuskan sebuah kebijakan terhadap perkembangan Kota Pariaman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Kajian-kajian yang relevan sejauh ini yang baru bisa penulis dapatkan data nya adalah kajian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan penelitian penulis namun bisa penulis jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Study relevan tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Dedi Dasrianto dalam skripsi yang berjudul (2010) *Sejarah pemekaran Pasaman* yang menyatakan dalam perkembangannya Pasaman cenderung terbagi atas dua jalur ekonomi yaitu Pasaman Barat yang lebih cenderung untuk melakukan berbagai kepentingan baik itu perdagangan, kesehatan, pendidikan ke Kota Padang atau Agam sementara untuk jalur ekonomi masyarakat Pasaman Timur lebih cenderung melakukan aktivitas ke daerah Lubuk Sikaping dan daerah Bukittinggi. Namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 38 tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Pasaman Barat maka pemekaran di Pasaman pun berhasil dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Timur

Penelitian Blendina Mery Mariana Sitompul dalam skripsi yang berjudul (2008) *Sekitar Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Pada awalnya Mentawai adalah daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Namun karena aksesnya yang jauh dan minimnya perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana menyebabkan masyarakat Mentawai menuntut dibentuknya Kabupaten Mentawai, sehingga dengan dikeluarkannya UU Nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Mentawai resmi dibentuk dengan ibukotanya Tuapejat.

Penelitian Fitri Dewi dalam skripsi (2005) *Perkembangan Solok Selatan (1969-2003)* Solok Selatan pada awalnya adalah daerah yang berada pada wilayah Kabupaten Solok. Akan tetapi karena luasnya wilayah Kabupaten Solok sehingga pembangunan di daerah Solok Selatan terabaikan. Sehingga masyarakat daerah Solok Selatan menuntut untuk hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri dan mengolah hasil buminya sendiri. Pada tahun 2003 daerah Solok Selatan sah sebagai kabupaten baru.

2. Kerangka Konseptual

Bintarto mengemukakan bahwa kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dan corak materielis. Ini ditandai dengan adanya kelas-kelas sosial akibat perbedaan ekonomi. Secara umum kota dapat diartikan sebagai tempat konsentrasi penduduk dengan sekelompok orang dalam jumlah tertentu yang hidup dan tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, berpola hubungan rasional ekonomis dan individualis dengan segala tingkah lakunya¹⁴. Keadaan geografis suatu kota juga mempengaruhi bentuk dan fungsi kota tersebut, apabila kotanya bergerak dalam bidang niaga dan perdagangan kota itu sebaiknya berada di daerah aliran sungai atau dekat pantai.

Pada umumnya "kota" itu diartikan sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan administrasi pemerintahan. Secara lebih rinci dapat digambarkan yaitu meliputi lahan geografis utamanya untuk pemukiman. Berpenduduk dalam jumlah relatif banyak (besar); di atas lahan yang relatif terbatas luasnya.; dimana mata pencarian penduduk didominasi dari sektor non pertanian; sebagian besar merupakan sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya), sektor pengolahan atau sektor sekunder (industri dan manufaktur, serta pola hubungannya antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis, dan individualis.¹⁵

¹⁴ S. Pamudji. *Pembinaan perkotaan di indonesia*. jakarta: Bina Aksara. 1982. hal:7

¹⁵ Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Kota Optimun Efisien dan Mandiri*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal 49

Sejak masa lalu, perkembangan kota-kota di Indonesia di bedakan menurut lokasi dimana kota itu berkembang, yaitu kota pantai (maritim) dan kota pedalaman (agraris). Hal tersebut merupakan akibat dari pengaruh latar belakang sosial budaya masyarakat setempat. Kota-kota pantai memiliki latar belakang yang berbeda dari kota pedalaman, masyarakat pada kota pantai lebih terbuka, dengan kehidupan utama bersumber dari perdagangan dan pelayaran, sedangkan masyarakat pedalaman lebih banyak terikat dengan tradisi agraris.¹⁶

Pemekaran wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S Purdawarminta, pemekaran berasal dari kata mekar (memekar) dan kekar. Mekar berarti mulai berkembang (mengurai, menjadi besar, ramai, bagus, dan lain-lain). Jadi pemekaran berarti proses menjadi menjadi bertambah (luas, banyak, dan lebar).¹⁷ Pemekaran kota adalah memperluas areal perkotaan yang telah ada. Usaha-usaha memperluas areal perkotataan tersebut adalah ditujukan untuk mengimbangi meningkatnya kebutuhan ruang kota sebagai akibat dari pada pengembangan dan pertumbuhan kota. Pemekaran kota itu sendiri, akan melibatkan wilayah-wilayah disekitarnya dan akan menimbulkan masalah-masalah yang bersifat ekonomis, sosial, dan politis administratif.¹⁸

Dalam perkembangan fisik kota, prasarana perkotaan tidak boleh diabaikan sama sekali (termasuk didalamnya adalah penyediaan air minum, jaringan sanitasi, drainase, jaringan listrik dan jaringan jalan).¹⁹

¹⁶ Zul 'Asri. *Sejarah Kota Bukittinggi 1945-1980: Perkembangan Kota Secara Fisik dan Hubungannya dengan Kepemilikan Tanah*. Tesis. (Depok: Universitas Indonesia, 2001) hlm 11-12

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 23

¹⁸ Bakaruddin. *Studi Pengembangan dan Peremajaan Kota*, Padang: FPIPS IKIP PADANG bekerjasama dengan IKIP Padang Press, 1994, Hal 30

¹⁹ Ibid hal 31

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur daerah otonomi dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah terdiri dari tiga azas yaitu antara lain

- a. Desentralisasi adalah penyerahan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada kepala pemerintahan yang mewakili pemerintahan pusat di daerah.
- c. Azas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang telah memerintahkannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah deskriptif. Penulisan ini harus memenuhi beberapa kriteria, prinsip dan aturan yang digunakan agar penelitian ini memperoleh hasil yang baik.²⁰ Louis Gohshalk mengatakan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi imajinatif pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh berbagai tahapan dan proses, dalam penulisan ini terdiri dari beberapa tahap.

²⁰Nugroho Notosusanto. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Inti Indayu Press, 1948, Hal 48.

Tahap pertama dalam dalam penulisan penelitian sejarah ini yaitu tahap Heuristik (pengumpulan dan menghimpun data) di dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu, pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang sezaman, juga dilakukan wawancara dengan informan dan tokoh yang terlibat langsung dalam terbentuknya Kotif Pariaman hingga lahirnya Kota Pariaman seperti anggota DPRD Kota Pariaman pertama yaitu bapak Fuady Jalil dan bapak Chairun Issa.

Informan ini terbagi dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah para informan yang ikut serta dalam terbentuknya Kotif Pariaman hingga Kota Pariaman. Sementara untuk kelompok kedua adalah kelompok yang duduk pada kursi pemerintahan Kotif Pariaman hingga Kota Pariaman. Selanjutnya untuk data sekunder, adalah data-data yang dapat menunjang penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan antara lain: Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang dan Perpustakaan Mr.H.St.Moh.Rasyid Kota Pariaman.

Tahap kedua adalah kritik sumber yaitu data ataupun dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengujian dan terhadap kebenaran, keaslian dan keabsahan informasi yang telah penulis temukan dilapangan. Dalam kritik sumber terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Kritik eksternal yaitu melakukan pengujian otensitas (keaslian) dengan mengamati hasil data mengenai terbentuknya Kotif Pariaman hingga munculnya Kota Pariaman. Kritik internal adalah kritik yang dilakukan untuk menguji kesahihan atau keabsahan informasi mengenai terbentuknya Kotif Pariaman hingga munculnya Kota Pariaman yang

diperoleh melalui arsip dan dokumen, menyesuaikan dengan kajian yang dianggap relevan.

Tahap ketiga adalah melakukan analisis dan interpretasi untuk memilah-milah data sumber sejarah yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Dalam hal ini telah dilakukan pengelompokkan sumber berdasarkan objek yang diteliti. Tahap analisis ini tentu melibatkan interpretasi guna merekonstruksi peristiwa yang ditulis. Lalu langkah terakhir adalah penyajian hasil penelitian (historiografi). Merupakan tahap akhir dimana data kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan secara sistematis menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi.